

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdi Yuhana. 2013. Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia “pasca perubahan UUD 1945. Fokusmedia. Bandung.
- Agung Djojosoekarto, *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis*,
- CST. Kansil. Cs. 2008. System Pemerintahan Indonesia. Bumi aksara. Jakarta.
- _____. Edisi Kedua. 2009. Hukum tata Negara Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. Edisi Keempat. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta.
- Handoko T. Tani, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPEF
- Ismatullah, Dedi., (2010), Akuntansi Pemerintahan, Unit Penerbit dan Percetakan Akademik, YKPN, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2012. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kementrian Keuangan Rebuplik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kebijakan Tahun 2019. <http://www.djpb.kemenkeu.go.id> Diakses pada hari senin, tanggal 10 Januari 2020 jam 14.00
- Marbun. (2006). DPRD pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mei Susanto, 2013. Hak Budgeting Parlemen di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Nafarin. 2000. “Pengaruh Perusahaan”. Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif. (2007). *Teoridan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Rahardjo Adisasmitha. 2010. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta

Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung Alfabeta.

Sujarweni. (2015) *Akutans Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Press

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Masagung.

Sumber Penelitian yang relevan

Aminudin. (2015). Fungsi pengawasan dprd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12).

Anwar, K. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2).

Ilmu, J. (n.d.). *JIPSi Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
<http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Kurniasih, D., & Daerah, O. (n.d.). *Penyelenggaraan desentralisasi fiskal di kabupaten bandung*. 1–14.

Kurniati, P. S. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Danpemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 3(1), 1–12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan.

Sumber Internet

Irwanda. 2020. "Hakim Tipikor Seret Beberapa Tersangka Terkait Proyek Lapangan Merdeka Kota Solok", <https://surya24.com/read/detail/1690/korupsi-tribun-lapangan-merdeka-solok-tiga-terdakwa-divonis-melebihi-tuntutan%C2%A0>

Marlina, Fitria. 2016. "Habiskan 4 Miliar lebih APBD Kota Solok tahun 2014, Ruislag Gedung DPRD Siapa yang bertanggung Jawab", <https://www.anta-news.com/kab-solok/habiskan-4-milyar-lebih-apbd-kota-solok-tahun-2014-ruislag-gedung-dprd-siapa-yang-bertanggung-jawab/>